

Pengimplementasian Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Novel “*After All This Time*” Karya Ollyjayzee

Sisto Nugro Laksono

Universitas Teknologi Yogyakarta

Rangga Pratama

Universitas Teknologi Yogyakarta

Eva Dwi Kurniawan

Universitas Teknologi Yogyakarta

Jl. Siliwangi, Jombor Lor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi penulis : eva.dwi.kurniawan@staff.ac.id

Abstract. *Good Corporate Governance (GCG) is a structure and mechanism that regulates the management of a company so as to create long-term sustainable economic value for shareholders and stakeholders. In achieving company goals, GCG has the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. This research uses qualitative methods and hermeneutic methods. The purpose of this research is to find out how the Track Construction Company implements the principles of Good Corporate Governance in the novel "After All This Time" by Ollyjayzee, in an effort to solve the problems faced in working on the Sindur toll road project. We hope that this research can provide lessons and additional information to readers. The results obtained are that by implementing the principles of Good Corporate Governance, the Track Construction Company can avoid the problems that hinder the work on the Sindur toll road project.*

Keywords: *Good Corporate Governance, company, novel.*

Abstrak. *Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan suatu perusahaan sehingga menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam mencapai tujuan perusahaan, GCG memiliki prinsip-prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode hermeneutik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Perusahaan Track Construction mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam novel “*After All This Time*” karya Ollyjayzee, dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengerjaan proyek tol Sindur. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan pelajaran dan tambahan informasi kepada pembaca. Hasil yang diperoleh yaitu dengan mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* maka Perusahaan Track Construction bisa lepas dari permasalahan-permasalahan yang menghalangi dalam pengerjaan proyek tol Sindur.*

Kata kunci: *Good Corporate Governance, perusahaan, novel.*

LATAR BELAKANG

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu struktur atau mekanisme yang mengatur pengelolaan suatu perusahaan, sehingga menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Istilah tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada sistem pengelolaan bisnis melalui fungsi pengawasan, peraturan, dan manajerial serta kerangka komunikasi yang jelas

antar pemangku kepentingan untuk tercapainya tujuan perusahaan (Nurjanah & Handayani, 2023:2).

Sedangkan menurut Kusmayadi dkk (2015:8) dalam bukunya mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* yaitu serangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kelangsungan usaha. Terdapat beberapa pemahaman mengenai pengertian *Good Corporate Governance* dari berbagai pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun semuanya mengarah pada tujuan dan pemahaman yang hampir sama.

Besarnya pengaruh implementasi GCG terhadap hasil keuangan perusahaan menunjukkan betapa pentingnya etika atau prinsip dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan perusahaan. Etika atau prinsip yang tercakup dalam GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*) (Filail dkk, 2022:2).

Dengan adanya penerapan GCG diharapkan dapat mencegah perusahaan mengalami kebangkrutan atau pun kerugian yang tinggi nilainya, dapat juga untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. Selain itu, GCG dapat juga menjadi salah satu solusi terhadap perusahaan yang sedang terkendala dalam menjalankan bisnisnya, seperti pada kasus di pembahasan ini.

Dalam pembahasan ini, kami mengangkat cerita dalam sebuah novel yang berjudul "After All This Time" Karya Ollyjayzee. Novel ini menceritakan tentang Rahman Hartala yang merupakan direktur operasional infrastruktur Track Construction diutus oleh Karnaka Dhanubrata yang seorang direktur utama Track Construction dari kantor pusat untuk menyelidiki permasalahan di kantor cabang tiga dalam menggarap Proyek Tol Sindur, pasalnya dalam proyek tol tersebut terdapat pembengkakan anggaran hingga ratusan miliar. Dalam menyelidiki permasalahan di dalam penggarapan proyek tol Sindur, Rahman menemukan banyak temuan yang berbau kecurangan (*red flags*), mulai dari pemimpin proyek yang kurang terbuka dan tidak independen, *miss* komunikasi antar divisi, dan adanya campur tangan dari pemerintah daerah dalam menggarap proyek. Setelah mengetahui adanya hal itu, keputusan yang berat menanti di depan mata, karena keputusan yang diambil oleh Rahman Hartala dan Karnaka Dhanubrata haruslah tepat dan efektif, kalau tidak perusahaan akan bangkrut.

Disitulah peran *Good Corporate Governance*, agar perusahaan tidak bangkrut maka perlu pengimplementasian lima prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana Perusahaan Track Construction mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam novel “*After All This Time*” karya Ollyjayzee, dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengerjaan proyek tol Sindur. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan pelajaran dan tambahan informasi kepada pembaca.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang dipakai dalam penelitian kami yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Berikut ini penjabaran dari lima prinsip *Good Corporate Governance*:

Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan yaitu terbuka dalam mengungkapkan informasi yang materiil sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, relevan mengenai perusahaan dan menjadikan informasi tersebut bisa diakses serta mudah dipahami oleh pihak lain yang berkepentingan (Himie, 2022:13).

Prinsip ini dapat diwujudkan antara lain melalui pengembangan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *Management Information System (MIS)* dan *Information Technology (IT)* untuk memastikan pengukuran kinerja yang memadai, dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Direksi dan Dewan Komisaris (Syofyan, 2021:108).

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif. Prinsip ini dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari wewenang, hak, tanggung jawab, serta kewajibannya masing-masing. OECD menyatakan bahwa prinsip ini mengacu pada adanya sistem yang mengatur hubungan antara organ-organ di dalam perusahaan (Himie, 2022:13-14).

Prinsip ini dapat diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat, mengembangkan Komite Audit dan risiko yang mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan tugas Audit Internal

sebagai mitra bisnis strategi, menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan mengelola pertentangan, menerapkan sistem penghargaan dan sanksi, menggunakan Auditor Eksternal yang memenuhi syarat. Selain itu Direksi diwajibkan mengeluarkan surat pernyataan bahwa isi laporan keuangan adalah benar dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan (Syofyan, 2021:110).

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar tujuan dari *good corporate governance* dapat terealisasi, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan lain-lainnya (Himie, 2022:14)

Prinsip ini dapat diwujudkan dengan pemahaman bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi dari adanya wewenang dan kewajiban, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjunjung tinggi profesionalitas dan beretika, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, serta mempertahankan lingkungan bisnis yang sehat (Syofyan, 2021:110)

Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara profesional dan tanpa adanya benturan kepentingan atau pun tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Himie, 2022:14).

Pengelola perusahaan harus bertindak secara mandiri sesuai peran dan tugasnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Prinsip ini mengharuskan pengelola perusahaan untuk tetap mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam peraturan perusahaan maupun perundang-undangan (Kusmayadi, Rudiana, & Badruzaman, 2015:40).

Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran bisa diartikan sebagai upaya atau tindakan yang tidak membedakan seluruh pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan yang terkait (Himie, 2022:14).

Prinsip ini dapat diwujudkan dengan cara membuat peraturan perusahaan untuk melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk dari oknum

yang tidak bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, serta menyajikan informasi yang wajar dan pengungkapan yang material (Syofyan, 2021:107).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dan hermeneutika, metode kualitatif sendiri merupakan kajian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena dalam kontak sosial yang alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikatif yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang dibicarakan. Sedangkan metode hermeneutik yaitu menafsirkan teks sastra untuk diketahui maknanya.

Data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari novel *After All This Time* karya Ollyjayzee, terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2023. Alasan kami menggunakan novel ini adalah karena ceritanya yang bagus dan masalah-masalah yang tersaji dalam novel ini juga seru dan menarik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan harus dapat memastikan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh area bisnis dan seluruh tingkat perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) yang berpedoman pada prinsip *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), prinsip-prinsip GCG terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan perusahaan. Penjelasan lebih lanjut akan kami paparkan di sub bab di bawah ini.

Keterbukaan (*Transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi maupun data secara akurat, tepat waktu, jelas, memadai, dapat diperbandingkan, serta tersedia bagi pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

“Sengaja tidak dikasih tembusan. Dan memang tidak perlu. Buat apa? Kamu nggak ada urusan dengan segala surat menyurat saya ke Jakarta!”

“Maaf, Pak Hilmy. Saya memang tidak perlu tahu soal suratnya, tapi dalam data lampiran ini produk divisi saya,” Rara menegaskan. “Jadi saya perlu memastikan apakah

yang dikirim sebagai laporan ini adalah data paling mutakhir. Karena seperti kita tahu, proyek Sindur ini sudah mengalami revisi desain berkali-kali" (Ollyjayzee, 2023:48).

Dalam kutipan percakapan teks diatas dapat dilihat bahwa pimpro tidak memberitahu kadiv *civil engineering* tentang laporan yang akan dikirim ke kantor pusat, hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi dan ketidakterbukaan dari pimpro. Menurut prinsip keterbukaan, seharusnya pimpro berdiskusi terlebih dahulu dengan kadiv *civil engineering* sebelum mengirim laporan, karena yang dilaporkan adalah rincian anggaran proyek yang merupakan hasil pengukuran dari bagian *civil engineering*. Menurut (Illabillah dkk, 2022:3) prinsip transparansi mengacu pada kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan tergantung pada kualitas informasi yang diberikan oleh perusahaan itu. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan data dan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat diperbandingkan dengan indikator lain yang sama.

"Jadi, gimana nih?" tanya Rahman akhirnya.

"Ya, seperti biasa. Ujung-ujungnya mungkin lo juga yang harus beresin," sahut Karnaka Enteng (Ollyjayzee, 2023:17).

Dalam kutipan teks diatas dapat disimpulkan bahwa kantor pusat ingin menyelesaikan ketidakterbukaan dengan melakukan investigasi dan penyelidikan dengan mengirimkan Rahman Hartala yang seorang Direktur Operasional Infrastruktur untuk mencari tahu kebenaran atas laporan yang dikirim ke kantor pusat.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat meyakini bahwa seluruh bagian dalam perusahaan mempunyai keterampilan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memiliki peran dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*.

"Saya memiliki dua opsi yang mungkin akan menarik bagi Pak Hilmy," kata Rahman kalem. Opsi yang sudah dia pikirkan masak-masak dalam waktu cukup singkat. Opsi yang dia putuskan setelah keluar dari ruangan Rara setengah jam lalu.

"Coba katakan, Pak Rahman. Biar saya bisa mempertimbangkan."

Rahman mengambil jeda beberapa saat sebelum berbicara. "Pertama, Pak Hilmy bisa kembali ke kantor pusat. Di sana Bapak dapat menunggu masa pensiun dengan damai, mengerjakan tugas-tugas yang tidak terlalu berat dan meninggalkan cabang serta proyek ini untuk kami selesaikan."

Pak Hilmy mengerutkan kening, seolah tak percaya pada Rahman.

"Atau opsi kedua, Pak Hilmy bisa tetap bertahan di sini. Kami dari kantor pusat akan menunggu laporan saja dan berjanji tidak akan intervensi apa pun, membiarkan Pak Hilmy

menyelesaikan keruwetan di sini menurut cara Pak Hilmy. Termasuk memecat siapa pun yang Bapak inginkan. Silahkan mencari solusi sekaligus sumber dana untuk pembengkakan biaya konstruksi tersebut, kalau memang ada” (Ollyjayzee, 2023:116-117).

Dalam kutipan teks diatas bisa disimpulkan bahwa Rahman kemampuan yang sesuai dengan tugasnya, yaitu untuk mencari tau tentang kebenaran yang ditutup-tutupi oleh pimpro. Dikarenakan pimpro yang merupakan orang lama dan dihormati oleh dirut di perusahaan Track Construction, ia tidak mau mengatakan kebenaran di balik membengkaknya anggaran proyek hingga ratusan miliar. Maka dari itu Rahman mengajukan 2 pilihan itu kepada pimpro, dan ia yakin bahwa pimpro akan memilih pilihan yang pertama. Dengan tidak adanya pimpro di kantor cabang, akan mempermudah Rahman dan timnya dalam melakukan investigasi dan penyelidikan.

Dalam prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara baik, terukur, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (Ningsih, 2021:3).

“Oke deh, kalau itu mau lo! Gue tunggu laporan lengkap. Beresin Sindur. Lalu balik ke sini. Gue ada rencana buat lo disini.” (Ollyjayzee, 2023:121).

Dalam upaya mempertanggungjawabkan kelanjutan Proyek Tol Sindur terhadap para investor, maka Karnaka memilih Rahman sebagai pimpro sementara menggantikan pimpro yang bermasalah tadi. Hal tersebut dilakukan karena Karnaka sudah tau kinerja Rahman, dan percaya bahwa Rahman bisa mengusut dan menyelesaikan permasalahan dalam pengerjaan Proyek Tol Sindur.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan dan reputasi baik di mata masyarakat.

“Ha? Seius ini? Ini kan belok ke jurang?” Dengan ekspresi ngeri Rara menunjuk garis kontur pada peta topografi yang dilalui koordinat baru.

“Kata orang lapangan, Pak Hilmy, Pak Erнау, dan Pak Purwadi sudah kesini. Surveyor yang dipakai juga bukan Pak Ansori, orang kita, melainkan tim Pak Purwadi bersama surveyor dari pemda” (Ollyjayzee, 2023:168).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pimpro sengaja mengganti tim surveyor, yang seharusnya tim Pak Ansori tetapi ia malah membawa tim Pak Purwadi dari pemda. Hal tersebut adalah tindakan yang melanggar kontrak dan melenceng dari peraturan perusahaan.

Dengan begitu pimpro dapat dengan mudah melakukan rekayasa terhadap Proyek Tol Sindur untuk memperoleh keuntungan pribadinya bersama dengan pemda.

"Penyelesaiannya nggak bisa kalau cuma di level kepala cabang kayak gue, Her. Ini porsinya direktur utama didampingi tim hukum korporasi. Siapa tahu harus lanjut sampai PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kan?" (Ollyjayzee, 2023:389).

Dalam kutipan teks diatas bisa disimpulkan bahwa memang masalah di dalam pengerjaan Proyek Tol Sindur sudah bertambah besar seiring berjalannya waktu. Rahman yang hanya pimpro sementara pun tidak bisa mengambil keputusan dikarenakan wewenangnya terbatas dan masalah itu juga melibatkan pemda. Maka harus dirut yang turun tangan untuk menangani masalah itu, karena jika salah mengambil keputusan maka masa depan perusahaan Track Construction dalam ancaman.

"Makanya, pergi sana! Lo butuh liburan, Man. Lihat, muka lo udah kucel stres berat gitu. Biarkan gue yang hendel disini, otak gue bisa karatan kalau nggak ngurusin sesuatu yang seru. Lagian lo pikir itu tim yang gue bawa cuma buat pajangan? Yang bener aja lo!"

Melihat Rahman masih berdiri membisu, Karnaka mendekat dan menepuk lengan juniornya. "Orang lo kan orang gue juga, Man. Mereka akan bantu gue kayak mereka bantu lo. Udah, nggak usah khawatir. Ambil libur seminggu atau berapa lama juga terserah, sebutuhnya lo. Matiin HP, dan ajak si Rara ke mana gitu. Kalian bisa persiapin pernikahan atau apa, terserah!" (Ollyjayzee, 2023:392).

Pada akhirnya dirut datang ke kantor cabang tiga untuk menggantikan Rahman yang sudah kelelahan. Hal itu memang harus dilakukan karena tanggung jawab terbesar berada pada direktur utama.

Di malam penangkapan Radid dari kediamannya, Rahman dan Rara baru kembali dari jalan-jalan (Ollyjayzee, 2023:396).

Dalam kutipan teks diatas dijelaskan pada akhirnya pihak dari pemda terbukti bersalah karena telah melakukan kerjasama dengan pimpro untuk mengubah rute dari Proyek Tol Sindur, sehingga terjadi pembengkakan anggaran proyek hingga ratusan miliar. Pihak-pihak dari pemda harus ditangkap untuk bertanggung jawab atas timbulnya masalah dalam pembangunan Proyek Tol Sindur.

Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus bisa menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun, tidak boleh terpengaruh dengan adanya kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan maupun tekanan apapun, sehingga keputusan dapat diambil secara obyektif.

“Ini ada indikasi kuat bahwa Pak Hilmy dikendalikan oleh pemda. Nggak rela banget gue!” lanjut Sony geram. “Track Construction perusahaan besar, bisa-bisanya di bawah pak Hilmy cuma jadi sapi perah orang pemda dari kota kecil kayak gini. Kalau mau ambil keuntungan dengan jadi broker jual-beli tanah, yang ngotak dikit dong mainnya!” komentar Sony berapi-api (Ollyjayzee, 2023:181-182).

Dari kutipan teks diatas dapat disimpulkan bahwa pimpro tidak mencerminkan sikap independen, dan malah merugikan perusahaannya sendiri. Pimpro bekerjasama dengan pemda untuk menggeser rencana Proyek Tol Sindur, yang pada akhirnya menimbulkan pembengkakan anggaran hingga ratusan miliar. Dalam hal ini pimpro juga sangat mendominasi wewenang di kantor cabang tiga, karena dirut perusahaan Track Construction memiliki utang budi dengan pimpro, makanya ia berani melakukan tindakan hingga sejauh itu.

Untuk memudahkan penerapan GCG, perusahaan harus dikelola dengan independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat pula dipengaruhi oleh pihak lainnya (Dewi, 2020:10).

“Maksud saya, tolong Pak Rahman pertimbangkan kembali posisi kami secara khusus sehingga kami memiliki jaminan bisa ikut dalam proyek ini, Pak. Kami akan memenuhi berapa pun...”

“Berapa pun apanya?” Potong Rahman akhirnya. Kali ini nadanya dingin dan ekspresinya serius, yang dalam kondisi normal akan membuat lawan berfikir baik-baik untuk menyerang. Cukup sudah dia buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting begini. “Maaf kalau memang maksudnya seperti itu, saya tidak mau menanggapi. Waktu saya terbatas. Silahkan tinggalkan...” (Ollyjayzee, 2023:376).

Dalam kutipan percakapan diatas terlihat jelas bahwa dari pihak pemda berusaha menyuap Rahman agar pihak pemda dapat andil lagi dalam Proyek Tol Sindur. Namun Rahman dengan pendiriannya yang kuat menolak suap dari pihak pemda. Rahman tetap independen tidak berpihak ke siapapun, dan tetap melanjutkan tugasnya untuk memperbaiki rencana jalur tol Sindur agar anggarannya tidak membengkak terlalu tinggi.

Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus bisa memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya untuk kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi perusahaan. Perusahaan juga harus memperlakukan pemangku kepentingan secara adil dan merata dalam hal kontribusi terhadap perusahaan.

“Lalu buat kita apakah aman, Mas Rahman?” tanya sang senior, menatap rahman dengan penuh spekulasi.

"Justru posisi kita aman kita di proyek Kota Mandiri, Pak. Kalau kondisi tak tertolong lagi dan KPK turun tangan, yang pertama diproses adalah pemda yang mengusulkan penggeseran lahan. Artinya, kondisi terburuk yang kita hadapi adalah dicabutnya adendum kontrak karena status pembebasan lahan ilegal. Tapi dengan mendapatkan proyek Kota Mandiri yang include dengan jalan aksesnya, kita semacam memiliki emergency exit karena bisa melanjutkan Sindur sesuai kontrak di jalur semula."

Dengung persetujuan mulai menggema. Sentimen positif itu pelan-pelan membuat Rahman bernapas lega. Dia melirik Karnaka yang diam-diam tersenyum mendukung aksinya (Ollyjayzee, 2023:319).

Dari kutipan teks diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh Rahman selaku pimpro sementara, direktur utama, dan dewan direksi. Semuanya dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, karena dewan direksi berhak untuk memberikan saran maupun memberikan persetujuan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran yang membebaskan semua bagian dari perusahaan untuk memberikan suaranya tetapi suara dengan jabatan lebih tinggi pasti diutamakan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi perusahaan Track Construction cukup kompleks. Dimulai dari pembengkakan anggaran proyek yang naik hingga ratusan miliar hingga ditemukannya kejanggalan-kejanggalan dalam pengerjaan proyek yang dipimpin Pak Hilmy tersebut. Maka dari itu pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Dengan pengimplementasian prinsip GCG di perusahaan Track Construction diharapkan agar meningkatkan kinerja perusahaan dengan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik serta meningkatnya efisiensi operasional perusahaan dan meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Dalam perusahaan Track Construction implementasi dari 5 perinsip GCG sudah terlaksana dengan baik. Penerapan prinsip GCG ampuh untuk menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan Track Construction. Prinsip pertama yaitu keterbukaan, semua bagian dari perusahaan harus saling terbuka, sehingga apabila ada kendala dapat teratasi dengan baik. Prinsip kedua yaitu akuntabilitas, diperlukan orang dengan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas dalam perusahaan agar keberlanjutan perusahaan dapat terjaga dengan baik. Prinsip ketiga yaitu Pertanggungjawaban, perusahaan harus mampu untuk

mematuhi peraturan perusahaan itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan agar terwujud tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip keempat yaitu independensi, independen penting untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran dalam menjalankan perusahaan untuk terus maju dan berkembang. Dan prinsip terakhir yaitu kewajaran, dalam menentukan keputusan diperlukan pertimbangan dan saran dari dewan direksi maupun pemegang saham yang merupakan pemangku kepentingan terlebih dahulu.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 10. DOI: <https://doi.org/10.30863/AL-TSARWAH.V3I2.1150>
- Filail, S. A., dkk. (2022). Analisis Lima Prinsip GCG Dalam Implementasi Sifat Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 2. DOI: <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.256>
- Himie, F. (2022). Perspektif GCG Atas Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Prinsip GCG Dalam Forum Komunikasi Pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang). *Jurnal Media Administrasi*, 6. DOI: <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.59>
- Illabillah, V. R. (2022). Keterkaitan Antara Transparansi Dengan Sifat Tablig Dalam Penerapan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3. DOI: <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.327>
- Kusmayadi, D., dkk. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Ningseh, A. R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif. *Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis*, 3. DOI: <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>
- Nurjanah, S. B., & Handayani, N. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Pada PT Angkasa Pura II (Studi Kasus Pada Divisi Airport Learning Center). *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 2. DOI: <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i1.33>
- Ollyjayzee. (2023). *After All This Time*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Malang: Unisma Press.